

WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI PENGELOLAAN DESA WISATA OLEH MASYARAKAT MUSLIM SEMBUNGAN DIENG

Ahmad Hidayatullah
IAIN Pekalongan
email: ahmad.hidayatullah@iainpekalongan.ac.id

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu jalan tercepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Utamanya bagi masyarakat desa, potensi alam yang dimiliki menjadi anugrah yang bisa digunakan untuk menekan angka kemiskinan melalui sektor ini. Namun demikian satu hal yang menjadi masalah adalah potensi dampak negatif yang ditimbulkan baik berupa moral maupun lingkungan. Inilah yang dilakukan oleh Desa Wisata Sembungan Dieng Wonosobo Jawa Tengah yang seluruh penduduknya beragama Islam. Maka dari keberadaan kearifan lokal bisa menjadi solusi dalam mencegah-membendung dampak tersebut. Menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan fenomenologis, artikel ini mencoba menggali tentang bagaimana Desa Wisata Sembungan mengelola wisata berbasis kearifan lokal. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Sembungan telah sesuai dengan idealitas komponen pariwisata, yakni *amenity*, *accessibility*, *attraction* dan *ancilliary*. Sementara secara implementatif keempat komponen itu dijalankan dengan berdasarkan kearifan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat Desa Sembungan. Sebuah pengelolaan wisata yang tidak lepas dari segi kebijaksanaan, kelestarian lingkungan dan konservasi terhadap apa yang sudah diwariskan oleh leluhur.

Kata Kunci: *Desa Wisata, Kearifan Lokal, Sembungan-Dieng*

A. Pendahuluan

Sektor pariwisata menjadi sebuah alternatif dari dampak era industry 4.0 yang diakui atau tidak telah melahirkan tingkat stress yang tinggi di tengah masyarakat (Utami et al., 2017: 311). Kondisi ini bisa dilihat secara simbolik dari diksi-diksi yang mulai bermunculan akhir-akhir ini di masyarakat. Kata *healing* misalnya, seakan tereduksi maknanya menjadi lebih ke arah padanan makna *refreshing*. Padahal secara makna asli – utamanya yang erat dengan keilmuan psikologi- *healing* merupakan sebuah proses penyembuhan terhadap kondisi kejiwaan manusia yang mengalami peristiwa berat dan itu didasarkan pada diagnosis ahli. Hari ini yang terjadi tidak demikian, karena kata *healing* hanya muncul dari gejolak jiwa sekelas penat yang segera harus ditindaklanjuti dengan rupa wisata dan sejenisnya. Artinya jika dilihat lagi-lagi secara simbolik itu mencerminkan betapa kondisi masyarakat saat ini rentan stress meski di saat yang bersamaan tingkat kesejahteraan di masyarakat terus berkembang.

Sebuah ironi secara sosial memang, jika melihat kondisi real di masyarakat yang demikian. Namun demikian dalam konteks sosio-ekonomi hal semacam ini justru menjadi

pein point yang membuka peluang guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat pada sektor yang lain. Dan sektor pariwisata adalah sebuah potensi besar yang bisa menjadi representasi dari ironi sosial tersebut. Pariwisata yang menekankan pada aspek *attraction* dalam salah satu komponennya, memang tidak selalu dimaknai dengan atraksi/pertunjukkan dalam makna yang sebenarnya (Scott, N., Baggio, R., & Cooper, 2008). Landscape keindahan alam juga menjadi aspek yang bisa ditawarkan sebagai sebuah pemenuhan hasrat psikis dalam menangani kepenatan masyarakat (Dwi, 2017). Dalam konteks ini maka desa bisa sangat potensial untuk menangkap peluang tersebut. Terlebih hari ini yang didengung-dengungkan oleh pemerintah adalah tentang bagaimana mewujudkan pemerataan kesejahteraan bukan hanya di kota namun juga di pedesaan. Hal ini juga sekaligus bisa menjadi alternatif dalam upaya membendung urbanisasi yang lagi-lagi justru menjadikan kesejahteraan yang dicita-citakan itu tidak merata.

Hanya saja dalam segala hal dampak –baik positif maupun negatif- tentu menjadi satu niscayaan yang akan muncul dan membersamai. Dampak positif berupa tumbuhnya kesejahteraan masyarakat, tentu tidak terlalu menguras pemikiran masyarakat. Namun sebaliknya dampak negatif adalah satu hal yang harus diantisipasi, karena jika tidak justru upaya menambah kesejahteraan pada masyarakat desa akan melahirkan ironi sosial baru. Alih-alih menambah kebahagiaan masyarakat desa, itu justru menghadirkan problematika yang memaksa masyarakat desa harus memutar otak lagi untuk mengurainya. Dan salah satu dampak paling ditakutkan dari adanya kemajuan sektor wisata di desa yaitu ancaman kelestarian alam pada satu sisi, dan ancaman perihal degradasi moral pada sisi yang lain (Armeli & Ibrahim, 2017). Ancaman kelestarian alam lahir dari adanya pemenuhan fasilitas wisata yang ugal-ugalan berupa homestay, resto dan sebagainya. Sementara ancaman degradasi moral yang dikhawatirkan adalah pola hidup oknum orang kota yang acap kali mengabaikan moralitas serta norma, dan kemudian mempengaruhi penduduk setempat. Hotel, losmen dan homestay dengan aturan yang terlampau longgar (bebas) juga dirasa menjadi momok dalam mempercepat degradasi moral tersebut.

Oleh karenanya masyarakat desa harus siap menerapkan berbagai antisipasi dalam upaya menghalau dampak negatif tersebut. Salah satu yang bisa diandalkan adalah kearifan lokal. Ini menjadi senajata potensial dalam membendung hal-hal negatif sebagai sebuah dampak majunya sektor wisata di desa. Karakteristik kearifan dalam tiga aspeknya (Mungmachon, 2012: 74), *kebijaksanaan*, *semangat kelestarian alam*, dan *kesinambungan terwaris dari generasi ke generasi* bisa menjadi benteng dalam mengatasi dua hal yang mengkhawatirkan. Ancaman kelestarian alam dan degradasi moral sekurang-kurangnya akan tereduksi jika masyarakat memiliki kearifan lokal, dan segenap generasinya mau untuk mempertahankannya.

Hal ini jugalah yang dijadikan pondasi bagi masyarakat Desa Sembungan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang mencoba mengelola desanya menjadi desa wisata karena memiliki potensi besar sebab secara geografis masih masuk dalam wilayah dataran tinggi Dieng. Bukan hanya itu secara kultur, desa Sembungan juga mewariskan keunikan-keunikan yang menjadi khas wilayah Dieng, salah satunya dengan keberadaan Bocah Gimbal. Belum lagi landscape alam yang luar biasa indah yang masuk dalam kawasan Desa Sembungan, seperti adanya Puncak Sikunir dengan khas Golden Sunset, Telaga Cebong, Jajaran Perbukitan, Air Terjun, yang begitu digilai wisatawan baik lokal maupun

mancanegara. Masyarakat desa Sembungan sadar betul atas anugrah yang dititipkan Tuhan itu, dan oleh karenanya mereka harus mengelolanya sebaik mungkin. Dengan apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu, Desa Sembungan pada akhirnya memilih untuk mengelola Desa Wisata berbasis Kearifan Lokal guna menghalau adanya dampak negatif baik secara lingkungan maupun moral-norma. Memegang status sebagai Desa Tertinggi di Pulau Jawa nyatanya masyarakat benar-benar bisa membuktikan bahwa kearifan lokal bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran dampak lingkungan dan moralitas di tengah hajat besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*Field Research*). Hal ini dibutuhkan untuk menggali data dan melihat fenomena secara real yang ada di tengah upaya masyarakat Desa Sembungan dalam mengembangkan Desa Wisata berbasis Kearifan Lokal. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Sebuah pendekatan dimana mencoba mengetahui satu kebudayaan langsung dari pelaku budaya itu sendiri (Hasbiansyah, 2008). Secara Implementatif hal ini diharapkan mampu menjawab tentang bagaimana masyarakat Desa Sembungan memandang Kearifan Lokal yang dimiliki, sekaligus bagaimana menggunakannya sebagai dasar pengelolaan sektor wisata guna mengantisipasi adanya dampak negatif baik lingkungan maupun moral.

C. Hasil dan Pembahasan

Wisata Berbasis Kearifan Lokal

Pariwisata sebagai sebuah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya akan bisa dijalankan dan mencapai tujuan jika memenuhi empat komponen pariwisata, yang disebutkan oleh Scott, N., Baggio, R., & Cooper (2008) seperti berikut:

Pertama, Amenity. Amenity/Amenitas adalah salah satu komponen pariwisata yang berbicara tentang bagaimana fasilitas dalam sebuah pariwisata dipenuhi. Hal ini penting mengingat potensi besar suatu wilayah dalam bidang pariwisata, akan sia-sia jika dari segi fasilitas umum tidak bisa dipenuhi. Fasilitas ini bisa berupa hotel, homestay, resto, pusat perbelanjaan, mushola, toilet umum dan sebagainya. Keberadaan fasilitas umum ini penting karena wisatawan membutuhkan kenyamanan untuk bisa menikmati obyek wisata yang ditawarkan.

Kedua, Attraction. *Attraction/atraksi* adalah komponen penting yang paling mendasar harus dimiliki sebuah obyek pariwisata. Ini karena atraksi adalah inti dari obyek wisata itu sendiri. Oleh karenanya atraksi dalam konteks ini tidak semata-mata berupa sebuah pagelaran atau pertunjukkan. Lebih dari itu atraksi dalam konsep ini bisa berupa landscape keindahan pemandangan obyek wisata, wahana wisata, sajian artefak kebudayaan, situs purbakala dan sebagainya. Bahkan dalam tahap tertentu tradisi dan kearifan lokal dari suatu wilayah juga bisa masuk dalam komponen atraksi. Sekali lagi keberadaan komponen yang

satu ini menjadi titik awal sekaligus paling menentukan dari pengembangan sebuah obyek wisata.

Ketiga, Accessibility. *Accessibility*/akses merupakan komponen berikutnya yang harus dimiliki sebuah obyek wisata. Akses bisa berupa informasi atas obyek wisata, namun lebih sering dimaknai secara spesifik sebagai fasilitas jalan –di dalamnya termasuk transportasi- yang bisa mengantarkan wisatawan ke obyek tersebut. Tanpa adanya akses jalan dan transportasi yang memadai, maka aspek atraksi dan amenities juga sia-sia. Terlebih hari ini di tengah kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya, orang akan disajikan dengan berbagai alternatif pilihan obyek wisata. Dengan potensi yang lebih baik pada dua komponen lain, namun kalah dari segi akses maka akan muncul sebuah kemungkinan wisatawan akan memilih obyek dengan kemudahan akses. Apalagi kalau secara kualitas yang sama, atau bahkan lebih rendah, maka probabilitas obyek wisata tersebut untuk dijadikan pilihan kian mengecil.

Keempat, Ancillary. Dalam konteks pariwisata komponen ini adalah terkait dengan organisasi. Organisasi dalam artian sebagai sebuah kelompok yang mengelola laju dan operasional obyek wisata. Semakin rapi secara manajerial maka di saat yang sama obyek wisata akan semakin berkembang. Oleh karenanya bicara tentang aspek *ancillary*, maka satu hal utama yang harus dipikirkan, yakni Sumber Daya Manusia (SDM). SDM dari pengelola akan menentukan arah ke depan dari sebuah pengelolaan wisata. SDM dalam wisata tentu tidak melulu perihal pendidikan formal, lebih dari itu pengetahuan dan skill dari hulu ke hilir industri pariwisata harus dikuasai. Apalagi bicara pariwisata, akan dihadapkan dengan banyak hal sebagai sebuah pertimbangan. Isu kesejahteraan ekonomi, lingkungan, norma harus menjadi titik dasar bagi para pengelola untuk bisa difahami dan diimplementasikan agar obyek wisata bisa terus berkelanjutan. Ini penting, karena betapa banyak modal finansial yang dikeluarkan oleh pengelola, namun karena ketidakcakapan SDM yang dimiliki, justru menjadi petaka bagi usaha wisata yang dibangunnya. Nama besar obyek wisata semisal Wonderia Semarang dan Kampung Gajah Lembang Bandung adalah sedikit dari contoh betapa hegemoni uang bukanlah melulu yang utama harus dipikirkan. Eksekutor, dalam hal ini para pengelola dengan segenap SDM berkualitas yang dimilikinya menjadi sangat krusial dalam pengelolaan pariwisata.

Sementara itu terkait dengan konsep kearifan lokal, Kearifan lokal sendiri dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam kamus Inggris-Indonesia, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* berarti kebijaksanaan. Secara umum, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya (Mariane, 2014: 117). Sementara bagi Mungmachon, (2012:174) Kearifan lokal menjadi pengetahuan dasar dari kehidupan, didapatkan dari pengalaman ataupun kebenaran hidup, bisa bersifat abstrak atau konkret, diseimbangkan dengan alam serta kultur milik sebuah kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan menurut (Saini, 2005) kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal.

Ini karena dalam terbentuknya kearifan lokal setidaknya terdapat tiga karakteristik yang harus terpenuhi, diantaranya (Mungmachon, 2012:174): *Pertama*, Kearifan lokal berisikan nilai kebijaksanaan yang syarat akan hal positif bagi kemaslahatan umat manusia. *Kedua*, Kearifan lokal selalu memiliki orientasi menjaga kelestarian alam. *Ketiga*, Kearifan lokal merupakan sesuatu yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Artinya sesuatu yang terjadi dan berlaku di masyarakat baik itu berbau seni, tradisi, bahkan sistem tidak seluruhnya bisa mendapat predikat kearifan lokal. Dalam perspektif Mungmachon ketiganya adalah satu kesatuan yang dibentuk dan diterapkan secara komprehensif dalam suatu tatanan masyarakat.

Maka jika ditarik dari pengertian dan kriteria-kriteria di atas maka membahas pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal tentu tidak boleh terlepas dari empat komponen pariwisata, yakni *amenity, accessibility, attraction, ancilliary*. Amenitas yang termanifest dalam bentuk fasilitas dan akomodasi, *accessibility* dengan terwujudnya akses jalan maupun informasi ke tempat pariwisata, *attraction* berupa satu pertunjukkan maupun *landscape* keindahan alam maupun wahana, dan *ancilliary* berupa organisasi pengelolaan yang baik, kesemuanya harus terintegrasi dengan kearifan lokal yang adanya. Artinya penyajian fasilitas, akses jalan, atraksi-konsep besar obyek wisata, serta pengelolaan harus disesuaikan dengan tiga aspek, yakni kebijaksanaan, kelestarian alam, dan mempertahankan nilai luhur yang sudah diwariskan (tanpa menutup ruang untuk inovasi). Jika tidak terpenuhi satu dari sekian indikator-indikator tersebut, maka konsep pengelolaan berbasis kearifan lokal bisa dipertanyakan.

Pengelolaan Desa Wisata berbasis Kearifan Lokal di Desa Sembungan

Desa Sembungan secara administratif masuk dalam wilayah kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo. Desa yang terdiri dalam 360 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah penduduk sekitar 1400an jiwa serta kesemuanya memeluk agama Islam ini masuk dalam kawasan strategis Wisata Dataran Tinggi Dieng. Bukan hanya itu, secara kultur desa Sembungan juga memiliki keterikatan dengan wilayah-wilayah Dieng lainnya, semisal dengan keberadaan bocah gimbang sebagai sebuah ciri khas. Sampai saat ini sebagaimana desa-desa lain di kawasan Dieng, Sembungan masih terus-menerus menurunkan bocah gimbang yang memang tidak bisa dibentuk secara genetis, dan cenderung masuk dalam ranah mistis-tradisi saja. Kendati demikian, itu juga merupakan satu anugrah karena menjadi salah satu aspek yang menarik bagi wisatawan lokal bahkan asing untuk datang ke desa Sembungan. Tidak semata-mata itu memang yang menjadi daya tarik dari kuatnya animo pengunjung untuk datang di desa yang mendapat gelar sebagai desa tertinggi di pulau Jawa yakni berada pada posisi 2.105 MDPL. Landscape keindahan alam yang terbentang berupa puncak Sikunir dengan Golden Sunrise-nya, Gugusan Perbukitan, Indahnya Telaga Cebong, dan masih banyak yang lainnya- kesemuanya turut menambah daya tarik dalam mendatangkan wisata.

Segegap potensi alam yang dimiliki itu tentu menjadi satu modal besar bagi seluruh masyarakat desa Sembungan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Datangnya turis yang berduyun-duyun –utamanya di akhir pekan- akan berbanding lurus dengan perputaran uang disana. Mulai dari homestay, tiket, kuliner, dan sebagainya, semua akan menjadi amunisi dalam memberantas kemiskinan di wilayah tersebut. Hanya saja sebagaimana pada umumnya obyek wisata, dampak merupakan sebuah keniscayaan. Keberadaannya harus

diantisipasi karena jika tidak konsekuensi logis berupa kerusakan berkepanjangan –baik moril-materiil- akan diterima masyarakat. Hal ini jugalah yang diupayakan oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Giri Tirto sebagai organisasi yang mengelola wisata di desa Sembungan. Upaya itu termanifest secara implementatif dengan menjadikan kearifan lokal sebagai titik tumpu dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Sembungan untuk bisa berdaya secara ekonomi, sosial maupun budaya. Adapun secara detail akan dijelaskan sebagai berikut:

Amenity

Aspek amenitas dalam pengelolaan wisata di desa Sembungan dilaksanakan bukan hanya baik secara administratif, tetapi juga secara lingkungan, bahkan mempertimbangkan aspek kebijaksanaan yang sesuai norma sosial dan ajaran Islam. Mulai resmi dibuka oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Giri Tirto pada tahun 2008 sebagai Desa Wisata, Sembungan secara perlahan mulai berbenah. Pemenuhan fasilitas mulai dari penginapan (*homestay*), ruko-ruko untuk umkm, sarana umum seperti mushola dan toilet, telah ada dan terawat cukup baik. Tentunya kesemua itu didirikan dengan prinsip memfasilitasi para pengunjung dan di saat yang sama juga meningkatkan produktifitas demi kesejahteraan masyarakat Sembungan.

Prinsip dalam membangun tentu tidak boleh melanggar lingkungan, dalam artian tidak diperkenankan sampai menyerobot akses air untuk pertanian sekitar. Hal lain yang diberikan demi kenyamanan para pengunjung adalah memberlakukan tarif standar untuk semua penginapan, kuliner dan oleh-oleh. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan pengunjung dari menjadi korban transaksi “*ngenthel rego* (memahalkan harga secara tidak wajar)”. Melalui salah satu anggota LMDH, yakni Burhan, menyampaikan bahwa apabila ada warga yang mengambil selisih di luar harga standar maka akan dikenai sanksi untuk tidak bisa melakukan aktifitas usahanya selama 3 bulan. Dengan diberlakukannya harga standar ini maka lebih menambah kenyamanan pengunjung. Dan dalam observasi lapangan yang peneliti lakukan, memang apa yang dijanjikan oleh LMDH benar-benar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Cek harga yang dilakukan secara random tidak menemukan selisih yang begitu besar, dan masih terhitung wajar untuk ukuran tempat wisata dengan tawaran keindahan alam yang luar biasa.

Hal ini dilakukan oleh LMDH Giri Tirto guna meraih kepercayaan publik untuk tetap berwisata di Desa Sembungan. Selain itu di awal masuk, pengunjung sudah dikenai tiket masuk sebesar Rp. 15.000,-. Jadi sebagai ganti, pengelola harus benar-benar menjamin kenyamanan para pengunjung. Di saat yang sama prinsip pengunjung adalah raja, di sisi yang lain ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh mereka. Tidak lantas hanya karena mereka hadir dan membayar tiket, pengunjung bertindak seenak hati tanpa aturan. Inilah titik kearifan lokal yang LMDH Giri Tirto terapkan guna mengantisipasi adanya berbagai dampak negatif yang justru berbahaya bagi masyarakat Sembungan.

Beberapa aturan diterapkan sebagai upaya konservasi terhadap nilai-nilai luhur masyarakat Sembungan adalah sebagai berikut:

- Pengunjung (perempuan) tidak diperbolehkan mengenakan pakaian berupa celana atau rok dsb di atas lutut. Sedangkan untuk baju, dilarang menggunakan baju tanpa lengan. Secara praktis ini merupakan hasil akulturasi antara budaya

Jawa dan Islam terkait cara berpakaian. Apabila melanggar, maka pengunjung tidak akan diperkenankan masuk wilayah desa Sembungan.

- Pengunjung yang menginap di homestay milik penduduk –dan memang semua homestay adalah punya penduduk setempat- tidak diperbolehkan menginap dalam satu kamar jika bukan muhrim. Dan untuk aturan ini, dalam observasi peneliti terlihat sangat ketat. Tidak seperti di tempat wisata-wisata lain yang hanya menjadikan aturan semacam ini hanya formalitas, bahkan meniadakannya. Karena dalam perspektif mereka yang berada di obyek wisata lain, menganggap ketatnya aturan penginapan akan menurunkan omset mereka. Tapi masyarakat Sembungan tetap tegas dengan aturan itu, mengingat dampak negatif dari adanya degradasi moral jika penginapan dibuat bebas secara aturan. Dan itu akan sangat buruk untuk nilai-nilai luhur yang selama ini tertanam dalam tatanan masyarakat Sembungan.

Dengan aturan-aturan di atas pengelola Desa Sembungan sebenarnya sedang mengupayakan adanya *win win solution* dalam relasi pengunjung dan masyarakat desa. Pengunjung mendapatkan kenyamanan secara fasilitas dalam menikmati wisata alam Desa Sembungan, sementara masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan tanpa harus kehilangan nilai luhur yang selama ini mereka pegang.

Accessibility

Komponen akses pada pengelolaan pariwisata di desa Sembungan terus menunjukkan progress positif. Hal ini karena secara geografis Desa Sembungan diuntungkan sebab masuk dalam wilayah strategis Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Jadi praktis keberadaan akses, utamanya dalam bentuk akses jalan untuk menuju ke Desa Sembungan sangat baik. Apalagi jalur yang ditempuh melalui arah Wonosobo, jalan yang akan dilewati oleh para pengunjung jauh lebih baik daripada jalur yang ditempuh melalui arah Banjarnegara. Hal ini wajar, mengingat secara positioning kabupaten Wonosobo memang memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibanding kabupaten Banjarnegara. Di sisi lain, pemkab Wonosobo juga memberikan kebijakan yang bagus dalam menjaga akses jalan yang dibangun. Sejak awal 2012 pemkab membatasi angkutan yang boleh mengakses jalur Dieng. Bus Pariwisata berukuran besar tidak diperkenankan memasuki jalur tersebut. Jadi kalau ada wisatawan menggunakan angkutan Bus Besar, akan dipaksa untuk transit di Terminal Wonosobo untuk berganti Bus Kecil untuk menuju arah Dieng. Hal ini dilakukan demi menjaga kekuatan jalan yang menjadi akses satu-satunya ke Dieng.

Kemudian dari pusat kawasan Dieng menuju desa Sembungan akses jalan juga cukup baik, dan justru jalur dari pusat desa menuju puncak Sikunir yang aksesnya masih kurang baik. Kendati demikian, hal itu disiasati oleh pengelola dengan menyediakan ojek dari kawasan Dieng ke Sikunir. Adapun dari kawasan parkir Sembungan yang bersebelahan dengan Telaga Cebong, menuju puncak Sikunir jalur pejalan kaki sudah sangat baik. Artinya dalam segi akses secara garis besar Desa Wisata Sembungan sudah memiliki modal yang cukup baik untuk mendatangkan wisatawan. Namun demikian perbaikan harus tetap dilakukan, mengingat animo pengunjung bermobil ataupun sepeda motor begitu besar utamanya di akhir pekan. Sebab jika dibiarkan kondisinya akan bisa memburuk dan berbahaya bagi warga sekaligus para pengunjung.

Attraction

Pada aspek atraksi, maka jenis atraksi yang masuk dalam konteks ini tentu *landscape* pemandangan alam yang dimiliki oleh Desa Sembungan. Mulai dari status desa tersebut sebagai pemilik gelar Desa Tertinggi di Pulau Jawa, sampai dengan keindahan yang dimiliki karena dilingkari oleh perbukitan yang luar biasa. Hal tersebut menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan. Belum lagi adanya danau “Telaga Cebong” dimana bisa dinikmati saat menginap di homestay-homestay milik penduduk. Telaga ini juga bisa dinikmati pemandangannya dari kawasan parkir Sikunir dimana biasanya para pengunjung mendirikan tenda untuk camping disana. Pusat kuliner yang berada di kanan-kiri masuk jalur pendakian Sikunir juga jadi daya tarik untuk memenuhi logistik atau sekedar menghabiskan waktu untuk wisatab kuliner bersama teman atau sanak keluarga. Dan yang menjadi daya tarik utama Desa Sembungan adalah Puncak Sikunir yang menawarkan *view* Golden Sunrise dan menjadi incaran para wisatawan baik lokal maupun manca. Dalam konteks wisata Religi, di desa ini juga terdapat beberapa makam wali yang biasa diziarahi oleh pengunjung, namun yang paling masyhur adalah Wali Sembung yang merupakan putra Mpu Supo seorang Mpu ternama dari kerajaan Demak Bintoro. Pada aspek atraksi yang lain, yakni berupa tradisi, daya tarik lain juga ditemukan dengan adanya Bocah Gimbang yang merupakan penduduk asli Desa Sembungan.

Kesemuanya itu menjadi satu kesatuan yang membuat desa ini layak disebut sebagai Desa Wisata. Namun demikian dalam menikmati aspek ini, pengunjung juga harus memperhatikan kearifan lokal yang sudah dijaga oleh masyarakat desa dari generasi ke generasi. Maka dalam observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, sejak kali pertama dibuka sebagai obyek wisata sampai saat ini belum pernah ditemukan pelanggaran-pelanggaran utamanya yang bersifat asusila yang ada pada pengunjung. Hal ini karena tegasnya aturan yang diterapkan. Jadi pengunjung dipaksa mengikuti aturan, bukan pengelola yang didekte untuk mentolelir berbagai keinginan pengunjung dengan latar belakang yang beragam. Norma sosial masyarakat dipadu-padankan dengan nilai keislaman inilah yang harus dipatuhi. Jika tidak mau mematuhi, maka pengunjung dipersilahkan untuk meninggalkan kawasan Sembungan. Dengan model pengelolaan semacam itu, nyatanya Desa Sembungan bukan hanya bertahan dalam mengelola wisata, lebih dari itu jumlah pengunjung selalu meningkat di tiap tahunnya.

Ancillary

Pada aspek ini bicara tentang bagaimana organisasi melakukan pengelolaan terhadap obyek wisata. Dalam konteks Desa Wisata Sembungan, pengelolaan dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Tirto. Organisasi dalam bentuk LMDH dipilih mengingat beberapa spot wisata yang akan dibuka merupakan tanah milik negara yang berada di bawah naungan Perhutani dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sendiri merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Perhutani pada tahun 2001 dalam upaya memberikan kesempatan bagi masyarakat desa hutan guna terlibat aktif terkait pengelolaan hutan. Keaktifan ini dijalin sejak terjadinya kerjasama antara Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan (Awang et al., 2008: 1).

LMDH di Desa Sembungan sendiri bernama Giri Tirto didirikan pada tahun 2008 dan diketuai oleh Tuyali. Tujuannya tentu ke arah pengelolaan obyek wisata Sembungan

secara lebih profesional. Dan dalam konteks program PHBM yang dijalin dengan Perhutani, dicapai sebuah kesepakatan tentang pembagian hasil 35% untuk Perhutani dan 65% untuk masyarakat Sembungan yang dalam hal ini dikelola melalui LMDH Giri Tirto. Selama bertahap kini akhirnya LMDH Giri Tirto telah mampu membuktikan mampu membayar kepercayaan Perhutani dan bahkan masyarakat desa. Hal ini tidak lain karena adanya sisi kearifan lokal yang berperan penting dalam jalannya pengelolaan di desa Sembungan. Nilai “*guyup*” yang telah diwariskan oleh para leluhur membawa mereka untuk mewujudkan dalam manifestasi kesejahteraan bersama.

Burhan selaku anggota dan pendiri inti LMDH Giri Tirto menyampaikan bahwa jika niat awal pendirian LMDH ini adalah untuk memperkaya diri, maka mereka semua hari ini bisa kaya raya hanya dari ticketing saja yang dipungut Rp. 15.000,-/orang. Belum lagi melalui sektor lain seperti monopoli perdagangan dan lain sebagainya. Namun bukan itu yang diwariskan oleh para leluhur melalui aspek agama dan norma. Maka kemudian 65% dari total pendapatan itu digunakan untuk membangun kesejahteraan bersama. Mulai dari biaya pendidikan masyarakat, kesehatan, pembangunan sarana desa, semua diambilkan dari 65% penghasilan tersebut. Dan kini nyatanya memang tidak lagi ada cerita masyarakat Sembungan sampai putus sekolah. Bukan hanya itu, bahkan pendidikan tinggi pun pemerintah desa melalui LMDH siap menanggungnya. Sebuah konsep luhur yang tidak semua pariwisata bisa menerapkannya. *Guyup* dengan mencapai kesejahteraan bersama akhirnya bisa diwujudkan dan semakin memperlihatkan progress positif di setiap tahunnya.

Pada sisi yang lain dengan dibukanya obyek wisata, masyarakat Sembungan kini perlahan mulai meninggalkan sektor pertanian kentang yang dalam beberapa pendapat ahli dianggap berbahaya untuk kondisi tanah di kawasan Dieng ke depannya. Ini karena adanya zat kimia yang secara masif masuk dalam proses tanam kentang demi menggenjot produktifitas hasil. Sebuah dilema di tengah iming-iming rupiah yang luar biasa namun memberikan ancaman cukup serius terhadap lingkungan. Namun dengan adanya sektor lain yakni pariwisata, dimana masyarakat bisa berimprovisasi meraih kesejahteraan dalam bidang kuliner, penginapan/homestay, cinderamata, jasa transportasi dan sebagainya. Hasilnya dalam meski tidak besar, kini 3% lahan pertanian sudah kembali berubah menjadi hutan. Jika ini konsisten dilakukan bukan tidak mungkin suatu saat nanti masyarakat Sembungan sadar akan kelestarian alam, dan semakin memperbesar luas hutan yang selama ini telah beralih fungsi sebagai lahan pertanian.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Desa Wisata oleh masyarakat muslim Sembungan telah sesuai dengan idealitas komponen pariwisata, yakni *amenity*, *accessibility*, *attraction* dan *ancilliary*. Sementara secara implementatif keempat komponen itu dijalankan dengan berdasarkan kearifan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat Desa Sembungan. Sebuah pengelolaan wisata yang tidak lepas dari segi kebijaksanaan, kelestarian lingkungan dan konservasi terhadap apa yang sudah diwariskan oleh leluhur. Aspek kebijaksanaan terlihat dari bagaimana mereka menghala dampak negatif sektor pariwisata berupa degradasi moral. Ini karena secara ketat mereka menerapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Bukan sebaliknya seperti banyak tempat wisata yang biasanya akhirnya didekte oleh keinginan-keinginan

pengunjung. Sementara pada sisi kelestarian alam, hasil manis pengelolaan wisata nyatanya perlahan telah mampu menambah luas hutan yang sebelumnya beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Adapun menjaga warisan leluhur bisa terlihat dari lestarynya artefak kebudayaan dan bukti sejarah –termasuk di dalamnya makam tokoh penyebar ajaran Islam- serta terjaganya nilai-nilai luhur utamanya pada konsep “*guyup*” dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

REFERENSI

- Armeli, D., & Ibrahim, H. (2017). Dampak Perilaku Turis Terhadap Moral Remaja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(2), 651–670. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
- Awang, S. afri, Widayanti, W. tri, Himmah, B., Astuti, A., Septiana, R. madya, Solehudin, & Novenanto, A. (2008). *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*.
- Dwi, R. (2017). Analisis Kepuasan Wisatawan Kota Bandung Berdasarkan Tourism Experience. *Proceeding Of Managament*, 4(3).
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1). <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>
- K.M., S. (2005). Kearifan Lokal di arus Global. *Pikiran Rakyat Edisi 30*.
- Mariane, I. (2014). *Karifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Mungmachon, R. (2012). Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Sciece*, 2(13).
- Scott, N., Baggio, R., & Cooper, C. (2008). *Network analysis and tourism*. Channel View Publications.
- Utami, P., Wahyuni, I., & Ekawati. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres Kerja Dan Pengendalian Stres Kerja Pada Tenaga Kerja Di Bagian Cargo Pt. Angkasa Pura Logistik Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(5), 311–317.
- Wawancara dengan Burhan, anggota dan pendiri LMDH Giri Tirto Desa Sembungan Dieng, pada tanggal 1 Maret 2022.